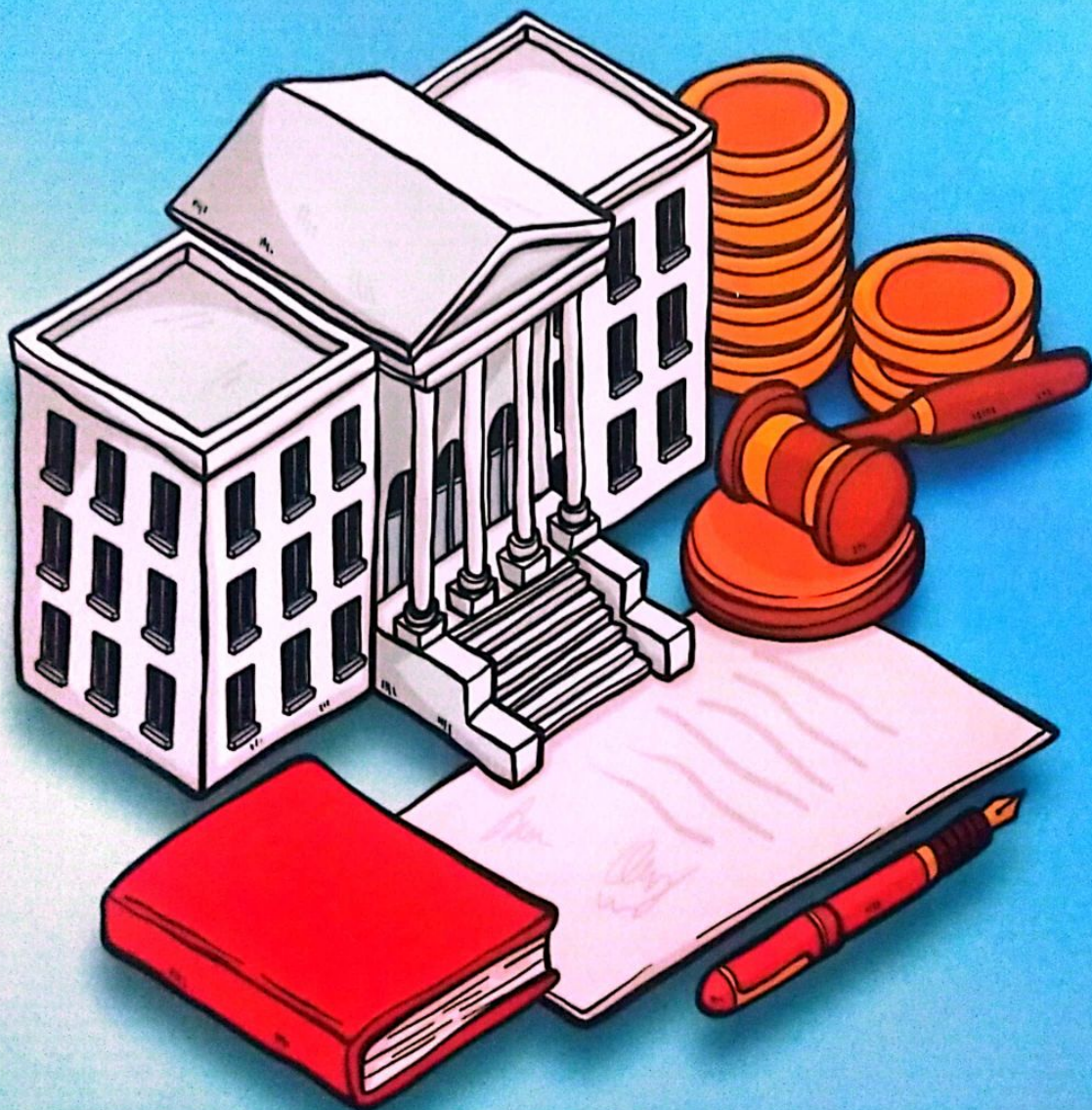


PERATURAN KEBIJAKAN (BELEIDSREGELS)

Teori, Konsep, dan Pengujian



ARINI NUR ANNISA, S.H., M.H

PERATURAN KEBIJAKAN (BELEIDSREGELS) Teori, Konsep, dan Pengujian

Penulis: Arini Nur Annisa, S.H., M.H.

Editor : Aditya Dwi Rohman, S.H.

Layouter: Rasmi Safitri

Desain Cover: M. Akhsan Agussalim

Makassar: © 2023

Copyright © Subaltern 2023

Hak cipta ada pada Penerbit Subaltern Inti Media

All right reserved

Cetakan Pertama, Maret 2024

ix + 154 Halaman

14 x 21 cm

Diterbitkan oleh Penerbit Subaltern Inti Media

PENERBIT ANGGOTA IKAPI

CV. Subaltern Inti Media

Jalan Mangga 3, Komplek Bumi Batara Mawang Blok

B4/21, Kel. Borongloe, Kec. Bontomarannu, Gowa.

Contact: 082299888879

Email: penerbitsubaltern@gmail.com

Website: penerbitsubaltern.com

ISBN: 978-623-8357-32-1

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I: KONSEP NEGARA HUKUM.....	1
A. Pendahuluan.....	1
B. Negara Hukum Kesejahteraan.....	10
C. Negara Hukum Indonesia.....	12
BAB II: PENGUJIAN NORMA HUKUM.....	14
A. Teori Perjenjangan Norma Hukum.....	14
B. Pengujian Norma.....	18
C. Pengujian Undang-Undang Terhadap Undang- Undang Dasar.....	20
BAB III: KEWENANGAN PEMERINTAH.....	27
A. Teori Kewenangan.....	27
B. Diskresi.....	36
BAB IV: INSTRUMEN HUKUM.....	44
A. Peraturan Perundang-Undangan.....	44
B. Peraturan Kebijakan.....	59
C. Korelasi Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Kebijakan.....	75

BAB V: PERATURAN KEBIJAKAN YANG BERKARAKTER PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	81
A. Pengertian Peraturan Kebijakan Berkarakter Peraturan Perundang-Undangan.....	81
B. Karakteristik Peraturan Kebijakan (<i>Beleidregels</i>) yang Berkarakter Peraturan Perundang-Undangan.....	83
BAB VI: PENGUJIAN PERATURAN KEBIJAKAN.....	106
A. Konsep Pengujian Peraturan Kebijakan.....	106
B. Perbandingan Pengujian Materil Peraturan Kebijakan Antar Negara.....	110
BAB VII: UJI MATERIL PERATURAN KEBIJAKAN BERKARAKTER PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	114
A. Teori Hak Mengusi (<i>Toetsingrecht</i>)... ..	114
B. Uji Materil Oleh Badan Peradilan.....	115
C. Uji Materil Eksekutif.....	129
D. Uji Materil Legislatif.....	145
DAFTAR PUSTAKA.....	149
PROFIL PENULIS.....	153

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Latief. 2005. *Hukum dan Peraturan Kebijaksanaan (Beleidsregel) Pada Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: UII Press.
- Achmad Ali. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (JudicialPrudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence) Vol.1*. Jakarta: Kencana.
- Achmad Ruslan. 2011. *Teori dan Panduan Praktik Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia*. Yogyakarta: Rangkang.
- Aminuddin Ilmar. 2013. *Hukum Tata Pemerintahan*. Makassar: Identitas Unhas.
- Aminuddin Ilmar. 2014. *Membangun Negara Hukum Indonesia*. Makassar: Phinatama Media.
- Azhary. 1995. *Negara Hukum Indonesia-Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-Unsurnya*. Jakarta: UI-Press.
- Bagir Manan & Kuntana Magnar. 1997 . *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*. Bandung: PT. Alumni.
- B.Hestu Cipto Handoyo. 2008. *Prinsip-Prinsip Legal Drafting dan Desain Naskah Akademik..*Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Fatmawati. 2006. *Hak Menguji (toetsingrecht) yang dimiliki Hakim dalam Sistem Hukum Indonesia*. Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada.
- Fathurohman, dkk. 2004. *Memahami Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Ganjong. 2007. *Pemerintah Daerah Kajian Politik dan Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Hotma Sibuea. 2011. *Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan dan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik*. Jakarta: Erlangga.
- I Gde Pantja Astawa, Suprin Na'a. 2008. *Dinamika Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*. Bandung: PT. Alumni.

- Jimly Asshidiqie. 2005. *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Jimly Asshiddiqie. 2006. *Hukum Acara Pengujian Undang-Undang*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Juniarso Ridwan, Achmad Sodik Sudrajat. 2009. *Hukum Administrasi Negara Dan Kebijakan Pelayanan Publik*. Bandung: PT. Nuansa.
- K.C. Wheare. 2003. *Konstitusi-Konstitusi Modern*. Surabaya: Pustaka Eureka.
- Maria Farida Indrati. 2007. *Ilmu Perundang-Undangan 1*. Yogyakarta: Kanisius.
- Munir Fuady. 2009. *Teori Negara Hukum Modern (Rechtsstaat)*. Bandung: PT. Refika Pratama.
- M. Solly Lubis. 2009. *Ilmu Pengetahuan Perundang-Undangan*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Ni'matul Huda & R.Nazriyah. 2011. *Teori dan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*. Bandung: Nusa Media.
- Ni'matul Huda. 2007. *Pengawasan Pusat terhadap Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: FH-UII Press.
- Philipus M.Hadjon, dkk. 2008. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Prajudi Atmosudirjo. 1994. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ridwan HR. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada.
- Sadjiono. 2011. *Bab-Bab Pokok Hukum Administrasi*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Safri Nugraha dkk. 2007. *Hukum Administrasi Negara*. Depok: Fak.Hukum Universitas Indonesia, Center Law and Good Governance Studies (CLGS).
- SF. Marbun. 2003. *Peradilan Tata Usaha Negara*. Yogyakarta: Liberty.
- Sumali. 2002. *Reduksi Kekuasaan Eksekutif di Bidang Peraturan Pengganti Undang-Undang (PERPU)*. Malang: UMM Press.

- Titik Triwulan T., Ismu Gunadi Widodo. 2011. *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Victor Imanuel W.Nalle. 2013. *Konsep Uji Materil (Kajian Pembentukan dan Uji Materil Peraturan Kebijakan di Indonesia)*. Jatim: Setara Press.
- Widodo Ekatjahjana. 2008. *Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Wily D.S.Voll. 2013. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yuliandri. 2009. *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik*. Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada.
- Zainal Arifin Hoesein. 2009. *Judicial Review di Mahkamah Agung RI (Tiga Dekade Pengujian Peraturan Perundang-Undangan)*. Jakarta: Rajawali Pers.

B. Karya Ilmiah, Jurnal, Artikel

- Abdul Razak. 2005. *Kedudukan dan Fungsi Peraturan Kebijakan Tentang Perizinan dalam Rangka Penyelenggaraan Pemerintahan*. Disertasi. Program Doktor Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
- Peraturan Kebijakan dan Kewenangan Diskresioner dalam Tata Hukum Nasional*. Jurnal Amanna Gappa. Vol. 13 No. 1 Maret 2005. Fak.Hukum Unhas.
- Ni'matul Huda. *Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang (Usulan Amandemen Kekuasaan Kehakiman)*. Jurnal Konstitusi Vol. 2. Jakarta: MK RI. November 2008.
- Majalah Konstitusi No. 97. *Beleidsregel*. Edisi Maret 2015.
- Rahmat Hidayat. *Analisis Yuridis Pembatalan Peraturan Daerah dalam Perspektif Executive Review*. Skripsi. Data Lampiran. 2012.

**C. Peraturan Perundang-Undangan, Putusan Pengadilan,
Surat Edaran**

UUD NRI 1945.

Undang-Undang No.9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata
Usaha Negara.

Undang-Undang No. 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan
Kehakiman

Undang-Undang No.5 tahun 2004 tentang Perubahan atas
UU No.14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Undang-Undang No.12 tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang No.30 tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan.

Peraturan Pemerintah No.79 tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No.53 tahun 2007 tentang
Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala
Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No.1 tahun 2014 tentang
Pembentukan Produk Daerah.

Surat Direktur Jenderal Pendidikan Islam Departemen
Agama Republik Indonesia No DJ.I/PP.009/973/2009.

Surat Edaran Direktur Jenderal Mineral Batubara dan Panas
Bumi, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
Nomor: 03.E/31/DJB/2009.

Putusan Mahkamah Agung No.4/P/HUM/2009

Putusan Mahkamah Agung No.3/P/HUM/2010

6. Dosen Pendamping Peraih Pendanaan Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Teknologi (2023).
7. Tim Publication Management Unit (PMU) Fakultas Hukum Unhas (2023).

Konsistensi dalam klasifikasi peraturan kebijakan secara format dan substansi sangat diperlukan sehingga terdapat karakter dan batasan yang jelas dalam menghasilkan peraturan kebijakan tepat guna oleh pejabat pemerintahan. Mekanisme pengujian peraturan kebijakan dalam suatu regulasi diperlukan sehingga pejabat pemerintahan maupun aparat hukum memahami kewenangan/kompetensinya dalam pengujian peraturan kebijakan berdasarkan prosedur yang ditentukan sehingga tidak terdapat kekeliruan dalam pengambilan keputusan maupun putusan.

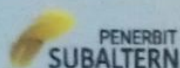
Buku ini memuat aspek-aspek substansi meliputi: Konsep Negara Hukum, Pengujian Norma Hukum, Kewenangan Pemerintah, Instrumen Hukum, Peraturan Kebijakan yang Berkarakter Peraturan Perundang-Undangan, Pengujian Peraturan Kebijakan, dan Uji Materil Peraturan Kebijakan Berkarakter Peraturan Perundang-Undangan.

Buku ini dapat dijadikan referensi para mahasiswa maupun praktisi hukum serta masyarakat pada umumnya yang ingin memahami lebih jauh tentang Peraturan Kebijakan sebagai instrumen pemerintahan yang berperan dalam pelayanan publik dan kepentingan masyarakat.



Arini Nur Annisa adalah tenaga pengajar pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Penulis menempuh pendidikan sarjananya di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada tahun 2010 dan lulus tahun 2014. Kemudian melanjutkan pendidikan magisternya lagi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada tahun 2014 dan lulus tahun 2016. Sejak tahun 2019 penulis menjadi dosen di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin pada program studi

Hukum Administrasi Negara, dan sebelumnya pun telah menjadi dosen luar biasa di Fakultas Ilmu Sosial & Politik UPRI Makassar (2016-2018) dan Fakultas Hukum UKI-Paulus Makassar (2017-2023).



Bumi Batara Mawang Blok B4/21, Bontomarannu
Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan - 92171
Phone : +62822 99 8888 79
e-Mail : penerbitsubaltern@gmail.com

